

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/271/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi publik secara efektif dan efisien di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut PPID BKPK dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID BKPK bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KETIGA : Masa kerja PPID BKPK sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2025

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 KESEHATAN
 NOMOR HK.02.02/H/271/2025
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN
 PEMBANGUNAN KESEHATAN
 TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
I.	PPID Pelaksana		
	Sekretaris Kebijakan Pembangunan Kesehatan Badan	PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2. menetapkan daftar informasi publik (DIP); 3. menetapkan usulan Informasi yang dikecualikan (DIK); dan 4. menyampaikan DIP dan usulan DIK kepada PPID Utama;
II.	Bidang Layanan Informasi Publik		
	1. Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan layanan informasi publik; 2. mengoordinasikan pemuatnakhiran informasi publik berkala, serta merta, dan sedia setiap saat; 3. melaporkan DIP kepada PPID Pelaksana; 4. menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana serta sistem informasi PPID; 5. menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID dengan tembusan PPID Utama; dan 6. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
	2. Fachrudin Ali Ahmad, Pranata	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pelayanan informasi publik;

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
	Humas Ahli Madya, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		2. melakukan pengumpulan bahan informasi publik;
3.	Irwan Fazar Wibowo, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		3. melakukan pemuktahiran Daftar Informasi Publik; dan
4.	Evi Suryani, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		4. melakukan koordinasi terkait dengan permohonan informasi masyarakat;
5.	Faza Nur Wulandari, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6.	Ahdiyati Firmana, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
7.	Kurniatun Karomah, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
8.	Nisa Fitriyani, Pranata Humas Mahir, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
9.	Nowo Setiyo Raharjo, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
III.	Bidang Dokumentasi Informasi Publik		
	1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasikan, dan penyediaan informasi publik; 2. mengoordinasikan verifikasi bahan/dokumen informasi publik; 3. mengoordinasikan penyusunan daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasi; dan 4. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan dokumentasi informasi publik;
	2. Tetrian Widiyanto, Pranata Komputer Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasikan, dan penyediaan informasi publik; 2. melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku;
	3. Isminah, Arsiparis Ahli Madya, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 3. melakukan verifikasi bahan/dokumen informasi publik;
	4. Achmad Syarif, Arsiparis Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 4. menyediakan dokumen/arsip sebagai referensi jawaban atas permohonan informasi; dan
	5. Eka Sri Setyaningsih, Arsiparis Terampil, Sekretariat Badan Kebijakan		<ol style="list-style-type: none"> 5. melakukan penyusunan daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasi;

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
	Pembangunan Kesehatan		
IV.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
	1. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> mengoordinasikan penyelesaian sengketa publik bersama PPID Utama; mengoordinasikan penerimaan dan memroses pengajuan keberatan informasi publik; mendampingi dan atau mewakili unit/satuan kerja dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi; dan mengoordinasikan uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan bersama PPID Utama;
	2. Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> membantu penyelesaian sengketa publik bersama PPID Utama; menerima dan memroses pengajuan keberatan informasi publik; mendampingi dan atau mewakili unit/satuan kerja dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi; dan membantu melakukan uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan bersama PPID Utama;
	3. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan		
	4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan		
	5. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan		
	6. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		
	7. Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli		

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
	Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	8. Hudzaifah Rahmatullah Mirah, Staf Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
V	PPID Pembantu		
	1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> menetapkan dan memutakhirkan DIP di lingkup satuan kerja; menetapkan usulan Informasi yang dikecualikan (DIK) di lingkup satuan kerja; dan menyampaikan DIP kepada PPID Pelaksana;
	2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan		
	3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan		
	4. Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		
VI	Unit Informasi Publik dan Dokumentasi		
	1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> melakukan pengumpulan bahan informasi publik; melakukan pemuktahiran Daftar Informasi Publik; melakukan koordinasi terkait dengan permohonan informasi masyarakat; melakukan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik; melakukan pemutakhirkan informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku; melakukan verifikasi bahan/dokumen informasi publik; menyediakan dokumen/arsip sebagai referensi jawaban atas permohonan informasi; dan
	2. Gottfried Christophorus Prasetyadi Nugroho, Pranata Komputer Ahli Pertama		
	3. Reny Fitriani, Arsiparis Ahli Pertama		
	4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan	
	5. Dedy Widjaya, Arsiparis Ahli Pertama		
	6. Ahmad Iqbal, Staf Tim Kerja Dukungan Manajemen		
	7. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan	

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
8.	Marta Hadisyah Putra, Analis Hubungan Antar Lembaga		8. melakukan penyusunan daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasi;
9.	Ria Resti Safriani, Pranata Komputer Pertama		
10.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pusat Kebijakan Strategi Dan Tata Kelola	
11.	Sonthy Yulianty, Arsiparis Ahli Muda	Kesehatan Global	
12.	Muhammad Fadli, Pranata Komputer Terampil		

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,


ASNAWI ABDULLAH